

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdurachman. (1978). *Masalah Pencabutan Hak dan Pembebanan Atas Tanah di Indonesia*. Seri Hukum Agraria I, Alumni.
- Achmad Ali. (2022). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Toko Gunung Agung.
- Apeldoorn, L. J. Van. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Boedi Harsono. (2015). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Universitas Trisakti.
- Effendi, M. (1994). *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Ghalia Indonesia.
- Aartje Tehupeiory. (2012). *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Raih Asa Sukses.
- Abdurachman. (1978). *Masalah Pencabutan Hak dan Pembebanan Atas Tanah di Indonesia*. Seri Hukum Agraria I, Alumni.
- Achmad Ali. (2022). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Toko Gunung Agung.
- Adi Sulistiyono. (2006). Budaya Musyawarah untuk Penyelesaian Sengketa Win-win Solution dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum Bisnis*, 25(1).
- Adrian Sutedi. (2012). *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Sinar Grafika.
- Agnes Wynona. (2013). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. *Jurnal Beraja Niti*, 2(8).
- Apeldoorn, L. J. Van. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Basyirah Mustarin. (2017). Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat. *Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 399.
- Boedi Harsono. (2015). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Universitas Trisakti.
- Dikdik Ripaldi. (2022). *Menanti Anyer Dalam Zona Damai, Menepis Trauma Korban Penggusuran PT KAI*.
<https://www.liputan6.com/regional/read/5100742/menanti-anyer-dalam-zona-damai-menepis-trauma-korban-penggusuran-pt-kai>
- Eddy Ruchiyat. (1989). *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*. Armico.
- Effendi, M. (1994). *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Ghalia Indonesia.

- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, & Absori. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31, hlm. 255.
- Elza Syarief. (2012). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. PT. Gramedia.
- Estevina Pangemanan. (2013). Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Lex Privatum*, 1(4), 59.
- Fitriyani, & Dwi Nurhayati. (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Sertifikat Ganda*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Harsono, B. (2005). *Hukum Agraria Indonesia*.
- Harsono, B. (2007). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*.
- Hartando Andy. (2009). *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*. Laksbang Mediatna.
- Hartono, S. (1982). *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*.
- Huala Adolf. (2004). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika.
- Indri Hadisiswati. (n.d.). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. *Jurnal Ahkam*, 2(1), hlm. 127.
- James Julianto Irawan. (2014). *Surat Berharga Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Prenadamedia Group.
- Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern. *Yustisia*, 3(2), 121.
- Joni Emirzon. (2000). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Gramedia Pusaka Utama.
- Kansil, Kansil, C., Engeline Palandeng, & Mamahit, G. (2009). *Kamus Istilah Hukum*.
- Kartini Muljadi, & Gunawan Widjaja. (2008). *Hak-hak Atas Tanah*. Kencana Prenada Media Group.
- Lili Rasudi dan I.B. Wyasa Putra. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya.
- Linda M. Sahono. (2012). Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Hukumnya. *Jurnal Prespektif*, 17(2), hlm. 92.

- Manulang, R. (2011). *Segala Hal Tentang Tanah Rumah dan Perizinannya*. Buku Pintar, Suka Buku.
- Marsudi Dedi Putra. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila. *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, 23., hlm. 145.
- Mochtar, K. (2012). *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*.
- Muhammad Erwin. (2012). *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo.
- Munir Fuady. (2000). *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Ningrum Ambarsari. (2019). Urgensi Pendaftaran Pada Tanah yang Belum Bersertifikat. *Al'adl*, X(1), 100.
- Otje, S., & Eddi, D. (2011). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Peter Salim. (2022). *Kamus Bahasa Indonesia Konterporer*. Modern Englishn.
- Prodjodikoro, W. (1974). *Bunga Rampai Hukum*. PT. Ichtiar Baru.
- Raharjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rizky Yulia Chandra, Gangga Santi, & Agung Basuki Prasetyo. (2017). Kekuatan Hukum Grondkaart Milik PT. Kereta Api Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(2).
- Rubaie, A. (2007). *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Bayumedia.
- Saim Aksinudin. (2016). *Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Bersertifikat Dihadapkan Dengan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Diindonesia*. 102.
- Salman S, O. (2010). *Perkembangan dan Dinamika Masalah*.
- Sangsun, F. S. (2007). *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah* (F. Darman (ed.)). Visimedia.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Santoso, U. (2014). *Hukum Perumahan*. Kencana.
- Santoso, U. (2017). *Hak atas Tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun*. Kencana.
- Saptosih Ismiati. (2010). *KDRT dan HAM*. Deepublish.
- Satjipto Rahardjo. (2003). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Kompas.
- Sembiring, R. (2017). *Hukum Pertanahan Adat*. Rajawali.

- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sidharta Arief. (2007). *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. PT. Refika Aditima.
- Soedikno Mertokusumo. (1988). *Hukum dan Politik Agraria*. Karunika Universitas Terbuka.
- Sonny Keraf. (1998). *Etika Bisnis Tuntunan dan Revelansinya*. Kanisius.
- Sukanti Hutagalung, A. (2012). *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia* (Andriansyah (ed.)). Raih Asa Sukses.
- Suparman. (2017). Peranan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Masyarakat Indonesia Yang Bersifat Agraria. *Jurnal Warta Edisi*, 54(1829–7463), hlm. 1. <https://media.neliti.com/media/publications/290570-peranan-undang-undang-pokok-agraria-bagi-346a5253.pdf>
- Supriadi. (2006). *Hukum Agraria*. Sinar Grafika.
- Suyanto, H. (2020). *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*.
- Takdir Rahmadi. (2011). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Urip Santoso. (2005). *Hukum Agraria & Hak-hak atas Tanah*. Kencana Prenada Media.
- Urip Santoso. (2013). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Kencana Prenada Media.
- V. Hadiyono. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 1, hlm. 24.
- Wahid, D. M. (2008). *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*.
- Waskito, & Arnowo, H. (2019). *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Kencana.
- Wita Pemerhati Rasa, Subarsyah, & Deden Sumantry. (2021). Legal Properties Of Indemnity As Prevention Of Ownership And Implementation Of Conversion Of Land Rights Based On Law Number 5 Year 1960 Concering Agrary Basics. *International Journal of Latin Notary*, 1(2), hlm. 66.
- Yudha Pandu. (2004). *Klien dan Advokat dalam Praktek*. Indonesia Legal Center Publishing.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijakan Selanjutnya

D. Sumber Lain:

Dikdik Ripaldi. (2022). *Menanti Anyer Dalam Zona Damai, Menepis Trauma Korban Penggusuran PT KAI*.
<https://www.liputan6.com/regional/read/5100742/menanti-anyer-dalam-zona-damai-menepis-trauma-korban-penggusuran-pt-kai>